**Abstract**

*This study analyzes the position and role of customary institutions in the regional government system in Gorontalo from the perspective of Constitutional Law. Customary institutions function to maintain cultural values, resolve social disputes, and partner with the local government in implementing policies based on local wisdom. However, formal recognition of customary institutions remains limited, and there is overlapping authority between customary institutions and the local government. This study uses a normative legal method with a statutory, historical, and conceptual approach. Data sources include Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2014, Law No. 6 of 2014, and Gorontalo Provincial Regulation No. 2 of 2016. The analysis was conducted descriptively to understand the position of customary institutions within the constitutional law framework and their implementation in the region.The results indicate that customary institutions serve as partners with the government in implementing local value-based governance, particularly in their mediation, cultural preservation, and public participation functions. However, Gorontalo Regional Regulation No. Regional Regulation No. 2 of 2016 still has weaknesses, such as the lack of a strong operational legal basis, unclear authority, the mechanism for appointing the chairman, membership, organizational structure, and the absence of regulations regarding the revocation of customary titles. These conditions weaken the legitimacy of customary institutions in carrying out their functions. Researchers recommend revising Regional Regulation No. 2 of 2016 or developing gubernatorial regulations/technical guidelines that detail the membership, organizational structure, terms of office, and working mechanisms of customary institutions. Strengthening the capacity of the younger generation and institutional synergy between local governments and customary institutions are necessary to realize participatory, inclusive governance based on local wisdom.*

***Keywords:*** *Customary Institutions, Regional Government, Constitutional Law, Gorontalo*



Dipindai dengan CamScanner

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan dan peran lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah di Gorontalo ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara. Lembaga adat berfungsi menjaga nilai budaya, menyelesaikan sengketa sosial, serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan berbasis kearifan lokal. Namun, pengakuan formal terhadap lembaga adat masih terbatas dan terjadi tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Sumber data terdiri atas UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2014, serta Perda Provinsi Gorontalo No. 2 Tahun 2016. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memahami posisi lembaga adat dalam kerangka hukum tata negara dan implementasinya di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis nilai lokal, terutama dalam fungsi mediasi, pelestarian budaya, dan partisipasi publik. Namun, Perda Gorontalo No. 2 Tahun 2016 masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya dasar hukum operasional yang kuat, ketidakjelasan kewenangan, mekanisme pengangkatan ketua, keanggotaan, struktur organisasi, serta ketiadaan aturan tentang pencabutan gelar adat. Kondisi ini menyebabkan lemahnya legitimasi lembaga adat dalam menjalankan fungsinya. Peneliti merekomendasikan perlunya revisi Perda No. 2 Tahun 2016 atau penyusunan peraturan gubernur/juknis yang mengatur secara rinci keanggotaan, struktur organisasi, masa jabatan, dan mekanisme kerja lembaga adat. Penguatan kapasitas generasi muda serta sinergi kelembagaan antara pemerintah daerah dan lembaga adat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan kearifan lokal.

***Kata Kunci :*** Lembaga Adat, Pemerintahan Daerah, Hukum Tata Negara, Gorontalo



Dipindai dengan CamScanner